

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sistem yang secara umum terdiri dari tiga komponen yaitu *input*, proses, dan *output*. Ketiga komponen tersebut memiliki ciri yaitu adanya perencanaan, saling ketergantungan (*interdependent*), dan memiliki tujuan (Hamalik, 2003). Peserta didik sebagai *input* utama dalam pendidikan harus dapat dikembangkan potensinya dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang memiliki berbagai kompetensi sesuai dengan tujuan pendidikan.

Tujuan Pendidikan Nasional dijabarkan dan diimplementasikan pada berbagai tingkat satuan pendidikan yaitu sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat terjadinya pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses terjadinya interaksi dua arah, yaitu mengajar dilakukan oleh guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik (Sagala, 2003). Hal ini bukan berarti peserta didik hanya menerima pengajaran dari guru, dan guru tidak belajar lagi tentang materi yang akan disampaikan kepada peserta didik, tetapi dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara guru dan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik. Agar semua peserta didik mencapai tujuan pendidikan, maka seorang guru harus memiliki keterampilan-keterampilan khusus sehingga peserta didik dapat belajar dan mengembangkan potensinya secara

optimal. Demikian pula guru IPA di SMP harus memiliki keterampilan-keterampilan tertentu sehingga mampu membimbing dan menghantarkan peserta didik mencapai Kompetensi Dasar (KD) dan Standar Kompetensi (SK) yang sudah ditetapkan dalam Standar Isi (SI).

Dewasa ini terjadi perubahan paradigma pembelajaran, yaitu pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru (*teacher-centered*) melainkan berpusat pada peserta didik (*student-centered*) dan pembelajaran harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan inteletualitasnya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik akan memberikan pembelajaran secara bermakna dan para peserta didik akan membangun sendiri pemahamannya. Dalam pembelajaran sekarang ini, guru berperan sebagai fasilitator, yaitu yang berperan aktif dalam pembelajaran adalah peserta didik. Guru memfasilitasi apa yang diperlukan oleh peserta didik, baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap.

Sebagaimana dikemukakan Mulyasa (2007: 21), bahwa guru yang efektif dan kompeten secara profesional memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif,
2. Memiliki kemampuan dalam mengembangkan strategi dan manajemen pembelajaran,
3. Memiliki kemampuan memberikan umpan balik (*feedback*) dan penguatan (*reinforcement*), dan
4. Memiliki kemampuan untuk peningkatan diri.

Pembelajaran yang baik dan efektif adalah pembelajaran yang mampu memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik secara adil dan merata (tidak

diskriminatif), sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Pengajaran bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan karena adanya kemampuan guru yang dimiliki tentang dasar-dasar mengajar yang baik. Hal ini dikemukakan Gagne & Brig (1979: 19) bahwa ” *instruction is the means employed by teacher, designer of materials, curriculum specialist, and promote whose purpose is to develop and organized plan to promote learning*”. Mengajarkan peserta didik bagaimana belajar merupakan suatu tujuan pendidikan yang sangat penting dan merupakan tujuan utama. Nur (2000: 5) menyatakan bahwa “Pengajaran yang baik meliputi mengajarkan peserta didik bagaimana belajar, bagaimana mengingat, bagaimana berpikir, dan bagaimana memotivasi diri mereka sendiri”

Guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan bagi peserta didik, namun demikian guru tetap dituntut memiliki kompetensi yang memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar yang harus dimiliki dan dipahami oleh guru salah satunya adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL), karena standar ini dapat digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik atau mutu lulusan yang diindikasikan oleh kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Ini berarti bahwa untuk dapat mencapai mutu lulusan yang diinginkan, maka perlu adanya peningkatan secara berkelanjutan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, karena salah satu faktor penentu mutu lulusan adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Selain memahami SKL, guru harus memiliki kemampuan untuk memahami standar

kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat pada Standar Isi. Kompetensi dasar dapat dijabarkan menjadi indikator-indikator yang harus dicapai oleh peserta didik.

Tenaga pendidik/guru dituntut memiliki kualifikasi akademik yang memadai dan memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan meliputi : 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi profesional, dan 4) kompetensi sosial. Hal ini terdapat pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu untuk pendidik pada jenjang SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki : 1) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); 2) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan 3) sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs.

Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas guru, antara lain melalui pelatihan-pelatihan, seminar, dan lokakarya bahkan melalui pendidikan formal yaitu menyekolahkan guru pada tingkat yang lebih tinggi. Tetapi karena jumlah guru yang begitu banyak (data jumlah guru PNS Provinsi Jawa Barat tahun 2010 adalah 266.840 orang, yang belum S1 jumlahnya 143.934 orang) sehingga kesempatan untuk meningkatkan pendidikan guru yang belum memiliki kualifikasi akademik maupun memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran masih belum merata. Kebijakan pemerintah tentang sertifikasi merupakan upaya baru, walaupun banyak kendala yang harus dihadapi, salah

satunya adalah banyaknya jumlah guru (1,2 juta) yang harus disertifikasi, sedangkan kemampuan pemerintah dalam sertifikasi hanya 12 % dari jumlah guru yang ada setiap tahunnya (Direktorat Pengembangan Profesi: 2006), diperkirakan sertifikasi dapat diselesaikan dalam waktu 10 tahun. Hal ini menyebabkan belum terjadinya pemerataan kesempatan bagi setiap guru untuk mengikuti sertifikasi profesi.

Selain itu upaya perbaikan kualitas pendidikan telah dilakukan dimulai tahun 1976 sejak standarisasi Kurikulum Nasional tahun 1975 pertama kali dikenalkan melalui sistem persekolahan. Perubahan kurikulum tersebut sangat mempengaruhi ketentuan tentang bahan-bahan mengajar dan belajar yang diperlukan oleh sistem sekolah, seperti buku teks, perpustakaan dan buku-buku perpustakaan sekolah dan berbagai bentuk peralatan belajar. Demikian pula pemerintah selama ini telah berupaya memperbaiki kinerja guru dan kinerja manajemen.

Meskipun sudah ada upaya yang dilakukan, antara lain melalui perubahan-perubahan kurikulum, peningkatan kinerja guru (pelatihan-pelatihan), forum ilmiah guru, kegiatan di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), tetapi pendidikan di Indonesia masih belum memperlihatkan hasil yang optimal. Seperti ranking yang diperoleh berdasarkan *Human Development Index* (HDI) dibandingkan beberapa negara dari Tahun 1995, 2000, 2003, 2004, dan 2005 masih di atas 100 yaitu masing-masing ranking 104, 109, 112, 111, dan 110. Secara khusus untuk pendidikan IPA peserta didik SMP di Indonesia, prestasi yang diperoleh untuk mata pelajaran IPA yaitu peringkat ke 32 dari 38 negara

untuk tahun 2000 (Sumber: TIMSS – Balitbang, 2000), dan untuk perbandingan internasional prestasi literasi IPA Indonesia memperoleh peringkat 38 dari 41 negara (Sumber: PISA, 2003).

Lebih lanjut, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), Fasli Jalal (PDIP Balitbang, 2004) memaparkan kelayakan guru yang ada di Indonesia, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kelayakan Guru SMP Negeri dan Swasta

Jenjang Pendidikan		Negeri	%	Swasta	%	Jumlah	%
SMP	Layak	202.720	43.3	96.385	20.7	299.105	64.1
	Tidak layak	108.811	23.3	58.832	12.6	167.643	35.9
	Jumlah	311.531	66.7	155.217	33.3	466.748	100.0

Dari segi kualifikasi guru, PDIP Balitbang (2004) mencatat bahwa dari 466.748 guru SMP baru 42,03 % yang berpendidikan sarjana. Pemerintah menargetkan pada tahun 2014 semua guru dari berbagai jenjang sudah berpendidikan sarjana sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 29 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Secara umum kualitas guru di Indonesia dari beberapa kajian masih dipertanyakan. Hal ini menggambarkan sekilas kualitas guru di Indonesia. Guru belum dapat dikatakan profesional jika penguasaan materi mata pelajarannya masih kurang, dan jika guru tersebut mengajar diluar bidang keahliannya.

Terlepas dari data-data di atas, kondisi guru yang juga signifikan untuk ditelaah adalah faktor motivasi guru yang cenderung mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain merupakan dampak dari krisis-krisis

seperti krisis ekonomi, politik, serta kepercayaan. Lebih lanjut, sebuah forum guru, mensinyalir rendahnya motivasi guru diduga terkait pula pada hal-hal berikut : (1) bagi guru yang belum sertifikasi profesi, rata-rata gajinya rendah dan kecenderungan mengambil kredit cicilan uang di bank sehingga gaji yang diterima tiap bulannya relatif kecil, ini menjadi penyebab guru mencari alternatif sumber penghasilan lain, (2) kekurangan kepala sekolah untuk menjadi teladan/panutan sehingga terjadi kejenuhan birokrasi mengurus pindah tugas, dan (3) kecilnya peluang bagi guru untuk meningkatkan karirnya.

Motivasi guru yang rata-rata rendah, secara umum akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, dan lebih khususnya lagi berdampak kepada hasil belajar peserta didik. Dengan diterbitkannya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan telah dilakukannya sertifikasi profesi kepada guru meskipun baru sebagian, mudah-mudahan ini menjadikan motivasi guru dalam melaksanakan tugasnya sehingga guru dapat berupaya lebih meningkatkan kompetensinya.

Standar kompetensi dan sertifikasi guru merupakan salah satu terobosan dunia pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru, sehingga ke depan semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. Dengan demikian, upaya profesionalisme guru akan segera menjadi kenyataan sehingga tidak setiap orang dapat menjadi guru.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan (PMPTK) yang berkedudukan di provinsi. LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya (Permen No. 7 Tahun 2007), LPMP menyelenggarakan fungsi: 1) pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat; 2) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat; 3) supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat; dan 4) fasilitasi sumberdaya pendidik terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat dalam penjaminan mutu pendidikan.

LPMP Jawa Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, salah satunya sudah mengadakan visitasi ke beberapa sekolah jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di kota/kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dari hasil visitasi kemudian dipetakan untuk difasilitasi sumber daya pendidikannya. Visitasi dilakukan sejak tahun 2005 sampai tahun 2007. LPMP memvisitasi sembilan dimensi sekolah, diantara sembilan dimensi sekolah antara lain ada uji kompetensi bagi guru dan peserta didik (Tabel 1.2) untuk semua mata pelajaran, observasi pembelajaran kepada guru yang diuji kompetensinya. Pada saat observasi kelas, dilihat juga administrasi pembelajaran yang dibuat oleh guru, kenyataannya masih banyak guru yang menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dari penerbit sehingga pelaksanaan

pembelajaran berbeda dengan apa yang tertulis dalam RPP. Dari observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran, pada umumnya guru masih mendominasi kelas (*teacher centred*) belum terlihat pembelajaran IPA yang sesuai dengan hakikat pembelajaran IPA, yaitu pembelajaran tidak hanya kepada hasil/konsep tetapi bagaimana konsep itu didapat. Kemampuan dalam penggunaan alat praktek masih kurang. Penilaian kebanyakan baru pada penilaian hasil belum kelihatan dilakukannya penilaian proses. Masih banyak guru yang belum melaksanakan program remedial dan pengayaan. Program pengayaan yang dilakukan guru selama ini cukup memberi pekerjaan rumah kepada peserta didik.

Tabel 1.2 Pemetaan hasil uji kompetensi untuk guru dan peserta didik SMP (Laporan Hasil Visitasi LPMP Jawa Barat Tahun 2006))

No	Tahun	Jumlah Kota/Kab	Jumlah Sekolah (SMP)	Uji Kompetensi Guru		Uji Kompetensi Peserta didik	
				Fisika	Biologi	Fisika	Biologi
1.	2005	8	232	38,93	57,58	30,70	37,55
2.	2006	3	63	56,73	49,15	38,25	53,62
3.	2007	5	100	54,63	55,52	41,37	

Pengembangan kompetensi guru mata pelajaran perlu dilakukan pada setiap sekolah untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas profesionalismenya sesuai dengan tuntutan jaman dan kebutuhan sekolah. Program pengembangan tersebut hendaknya memberi penekanan pada pembentukan keterampilan profesional mereka, guna perbaikan pelayanan terhadap peserta didik di sekolah. Pengembangan guru mata pelajaran dapat dilakukan di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) karena

MGMP merupakan forum/wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran. Keberadaan MGMP selama ini belum diberdayakan secara optimal sesuai dengan fungsinya oleh guru dari semua mata pelajaran. Dengan kata lain, kebanyakan kegiatan di MGMP belum mengarah kepada kegiatan peningkatan keprofesionalan guru mata pelajaran, tetapi baru pada kegiatan penyusunan administrasi pembelajaran yaitu penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Peningkatan kompetensi selain dengan pelatihan, dapat dilakukan juga melalui, lokakarya, *workshop*, seminar, forum ilmiah dan sebagainya. Sistem pelatihan yang sudah dilakukan di LPMP, lebih banyak ke pelatihan penyegaran dengan pola 30 sampai dengan 120 jam (1 jam 45 menit) belum sampai kepada pelatihan berjenjang (tingkat dasar, lanjut, menengah, dan tinggi). Pelatihan berjenjang sudah dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (P4TK IPA) yang dulu namanya Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA (PPP-G IPA). Dalam pelatihan penyegaran, tidak dilakukan pembinaan pasca pelatihan (tindak lanjut) oleh LPMP. Dari hasil evaluasi dampak diklat yang dilakukan LPMP, ditemukan masih banyak guru yang sudah mengikuti pelatihan ketika kembali ke sekolah mengajar seperti biasa ketika belum mengikuti pelatihan. Untuk mengatasi hal ini, perlu diadakan pelatihan yang lebih fokus pada upaya pemberdayaan guru, sesuai kapasitas serta permasalahan pembelajaran yang dihadapi masing-masing guru di sekolah yaitu model *Lesson Study*.

Lesson Study yaitu suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan *mutual learning* untuk membangun komunitas belajar (Sumar Dkk.2006). *Lesson study* dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu *Plan* (merencanakan), *Do* (melaksanakan), dan *See* (refleksi) yang berkelanjutan. Dengan kata lain *lesson study* merupakan suatu cara peningkatan mutu pendidikan yang tidak pernah berakhir (*continuous improvement*).

Lesson Study sudah dikembangkan di berbagai kota/kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. *Lesson Study* yang diimplementasikan selama ini, yaitudiawali dengan *workshop* satu hari untuk pengenalan *lesson study* dilanjutkan dengan *plan, do, dan see*. Dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kegiatan *lesson study*, keberhasilan kegiatan *lesson study* antara lain, meningkatnya kinerja guru dalam pembelajaran atau memperbaiki kualitas pembelajaran dan terjadinya kolaboratif sesama guru mata pelajaran. Monev yang dilakukan selama ini, yaitu memonitor semua tahapan kegiatan *Lesson Study* yang meliputi, tahap identifikasi masalah (pemilihan topik untuk *open lesson*), merancang pembelajaran, uji coba dan penyempurnaan *teaching material*, implementasi pembelajaran dan refleksi.

Sejauh ini monev *lesson study*, belum melakukan monev terhadap dampak kegiatan *lesson study* bagi guru observer atau peserta *lesson study* yang tidak menjadi guru model, sehingga tidak diketahui bagaimana kinerja guru-guru yang tidak menjadi guru model dalam kegiatan *lesson study*. Perlu dikembangkan suatu model pengembangan profesional guru, untuk mengakomodasi kegiatan

yang belum dilakukan dalam pola pembinaan *lesson study*, yaitu dengan melakukan observasi pembelajaran terhadap guru observer. Untuk memaksimalkan dampak jenis-jenis pelatihan dalam mengembangkan suatu model, dikembangkan kombinasi model pelatihan yang dilakukan oleh LPMP, P4TK, dengan pembinaan *lesson study*.

Apapun model pengembangan pelatihan yang diterapkan pada kegiatan peningkatan kompetensi guru, secara umum dilakukan melalui tahap, *need analysis, objective Setting, design process implementation*, dan *evaluation process* (Saguisag, et all. 1991). Untuk mengatasi keprofesionalan guru IPA, dapat dirancang suatu model pengembangan profesional berkelanjutan yang didasari oleh model pelatihan empat elemen tersebut dan mengkombinasikannya dengan model pembinaan *Lesson Study*.

Berdasarkan uraian di atas, untuk meningkatkan kompetensi guru IPA SMP perlu dilakukan melalui kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di MGMP yaitu kegiatan yang tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi berkelanjutan agar profesional guru IPA dapat berkembang. Kegiatan pelatihan dilaksanakan di MGMP, karena MGMP merupakan suatu organisasi profesi guru, tempat guru untuk saling menukar informasi, berdiskusi tentang pengembangan kurikulum, pendekatan, metode maupun teknik mengajar, teknik mengevaluasi, dan diskusi tentang inovasi-inovasi dalam pembelajaran yang dapat dikembangkan di sekolah masing-masing. MGMP betul-betul dimanfaatkan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan profesionalisme guru. Prinsip kegiatan di MGMP adalah “*dari guru, oleh guru dan untuk guru*” (Zamroni, 2002).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana model pengembangan profesional guru secara berkelanjutan dengan melibatkan pola pembinaan *lesson study* (PPBLS) dapat meningkatkan kompetensi guru dalam pengembangan pembelajaran IPA di MGMP?”. Agar rumusan masalah lebih operasional maka diuraikan lebih rinci menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah karakteristik model PPBLS di MGMP Gugus, yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam pengembangan pembelajaran IPA?
2. Bagaimanakah kompetensi guru IPA SMP dalam mengembangkan pembelajaran IPA di sekolah setelah penerapan Model PPBLS?
3. Apa keunggulan dan keterbatasan model PPBLS di MGMP Gugus/Wilayah ?
4. Bagaimana tanggapan guru IPA/peserta MGMP terhadap model PPBLS di MGMP Gugus/Wilayah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghasilkan model PPBLS bagi guru IPA yang dilaksanakan di MGMP Gugus dan dapat dikembangkan ke MGMP Gugus lainnya.
2. Mengetahui peningkatan kompetensi guru IPA dalam mengembangkan pembelajaran IPA setelah diterapkannya model PPBLS di MGMP Gugus.
3. Menggambarkan keunggulan PPBLS yang dikembangkan
4. Meningkatkan profesionalisme guru IPA melalui *Lesson Study* di MGMP.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan praktis dalam upaya perbaikan pendidikan, yaitu:

1. Memberikan suasana baru untuk memotivasi guru-guru IPA dalam kegiatan MGMP.
2. Sebagai referensi bagi guru-guru dalam mengembangkan profesionalitasnya.
3. Menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru IPA SMP.
4. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai model pengembangan profesi guru oleh LPMP dan pihak-pihak terkait untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
5. Membantu pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru IPA SMP yang sudah lulus sertifikasi profesi.
6. Sebagai sumbangan pemikiran untuk penelitian lain yang mengkaji masalah yang serupa.

E. Penjelasan Istilah

1. Pengembangan profesional berkelanjutan (PPB) merupakan kegiatan yang dilakukan guru secara berkelanjutan untuk mengembangkan profesionalitasnya selama perjalanan karirnya, untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang akan berdampak kepada hasil pembelajarannya.
2. Kompetensi guru IPA adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru IPA untuk

melaksanakan kinerjanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara Nasional maupun Internasional.

3. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan wadah kegiatan profesional bagi para guru mata pelajaran yang sama di tingkat Kota/Kabupaten yang terdiri dari sejumlah guru, baik guru di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
4. MGMP Gugus/Wilayah merupakan MGMP yang pengurus dan pesertanya berasal dari sekolah-sekolah yang berdekatan atau satu Gugus/Wilayah dari suatu Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.
5. *Lesson Study* adalah model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan *mutual learning*.
6. Model PPBLS, meliputi seluruh kegiatan MGMP yang dirancang dan dipersiapkan untuk meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran IPA dengan pelatihan yang mengacu pada kebutuhan guru, implementasi *Lesson Study*, dan *workshop* penguatan pemahaman pembelajaran IPA.

